BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
PROVINSI BENGKULU
SELASA, 5 JUNI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Tuntaskan Masalah Aset Tanah

Pemkot Sulit Raih WTP

BENGKULU - Pemerintah Kota (Pemkot) yang belum bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) setiap tahunnya, kembali mendapat sorotan berbagai kalangan. Terlebih lagi, tidak dapatnya WTP lantaran faktor masalah aset yang belum tertata dengan baik.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota, Heri Ifzan, SE menilai, salah satu hasil audit keuangan dari BPK, masih ada temuan terkait masalah aset tanah. Ia mengatakan, untuk meraih opini WTP, maka Pemkot harus menata seluruh aset lebih baik lagi.

Baca *TUNTASKAN.. Hal 19*

Sambungan dari hal 9

"Kita melihatnya miris, ketika Pemkot selalu sulit dapatkan WTP. Kendalanya termasuk soal aset tanah yang bermasalah tak kunjung tuntas. Persoalan ini perlu diselamatkan dan dikawal. Inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh Pemkot Bengkulu untuk secepatnya tuntaskan aset tanah yang tak bersertifikat itu," kata Heri, kemarin (4/6).

Menurut Heri, masalah penataan aset tanah di Kota Bengkulu sampai saat ini masih terus menjadi masalah. Salah satunya polemik 360 bidang tanah milik kota, sebanyak 214 bidang tanah yang belum bersertifikat menjadi sorotan berbagai kalangan. Menurutnya, ini bukti lemahnya penataan administrasi yang ada di Pemkot Bengkulu.

"Seharusnya kasus tanah itu sebenarnya tidak perlu menjadi masalah yang berlarut-larut. Kalau Pemkot mempunyai bukti arsip dokumen tentang bukti-bukti tanah milik masyarakat, tentu pasti gampang mengurusi bukti sertifikat kepemilikan," terangnya.

Selain itu, lanjut Heri, sebaiknya yang dilakukan Pemkot saat ini adalah melakukan pemetaan ulang seluruh aset tanah yang ada diwilayah Kota Bengkulu. Tujuan pemetaan ulang tersebut salah satunya untuk penyelamatan asset yang terkesan amburadul. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berpolemik soal tanah. "Alangkah baiknya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan pemetaan ulang seluruh aset tanah. Agar tidak tumpang tindih," jelasnya.

Selain itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota, Hamsi, A.Md, Kota Bengkulu tidak bisa meraih opini WTP selama 5 tahun berturut-turut mulai 2013 hingga 2017. Salah satunya hasil audit keuangan dari BPK, masih ada temuan terkait masalah aset tanah.

"Untuk meraih opini WTP kembali, maka Pemkot harus menata seluruh aset lebih baik lagi. Terutama keseriusan Pemkot dalam menjaga asetnya. Sebab jika sudah terdata dengan baik seluruh aset tanah yang ada itu, maka lebih jelas dan tahu siapa kepemilikannya. Sehingga perlu diselamatkan dan dikawal. Inilah yang harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota," paparnya.

Terkait hal itu, dikonfirmasi Penjabat Walikota, H. Budiman Ismaun dihubungi beberapa kali ponsel pribadinya tidak aktif.

Teken Pakta Integritas

Hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan hasil pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017, memaksa Pemkot Bengkulu berbenah. Senin (4/6), seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan di ruang rapat Sekretariat Kota Bengkulu.

Mereka dikumpulkan untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK terhadap dugaan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Seluruh OPD yang memiliki temuan potensi kerugian negara oleh BPK diminta untuk segera mengembalikan temuan itu.

Rapat sendiri dipimpin oleh para Asisten Pemkot Bengkulu dan Inspektur Inspektorat, Sahaduin, AK, M.Si. Pertemuan tersebut tertutup bagi awak media. "Sesuai instruksi dari Penjabat Walikota dan juga Sekda, setiap rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti segera. Temuan-temuan (keuangan, red) harus dikembalikan," kata Sahudin.

Namun Sahudin enggan menjelaskan, berapa nominal anggaran yang menjadi temuan BPK sebagai kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. "Kalau jumlahnya kita tidak bisa berikan keterangan," ujarnya.

Menurutnya, rapat sekaligus mempersiapkan tahun 2018 ini, supaya dalam LHP BPK nantinya mendapatkan opini WTP. Sehingga seluruh kepala OPD menyepakati untuk menandatangani pakta integritas untuk melakukan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntable, sehingga mendapatkan opini WTP.

"Konsekuensinya adalah evaluasi kinerja masing-masing kepala OPD. Menjadi bahan penilaian pimpinan kepada kepala OPD, terhadap komitmen pengelolaan keuangan daerah," terangnya. **(new/del)**